

IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR
(Analisis Yuridis, Politis Dan Konstitusional)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
MUH. SADLI SABIR
10300112019

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

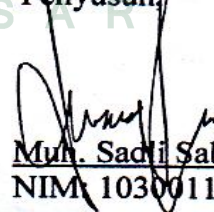
Nama : Muh. Sadli Sabir
NIM : 10300112019
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 09 April 1994
Jur/ Prodi/ Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/ Program : Syaria'ah dan Hukum
Alamat : Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Patalassang,
Kabupaten Takalar
Judul : Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar (Analisis
Yuridis, Politis Dan Konstitusional)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 17 Maret 2016
Penyusun,


Muh. Sadli Sabir
NIM 10300112019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis Dan Konstitusional)”, yang disusun oleh Muh. Sadli Sabir, NIM: 10300112019, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 28 Maret 2016 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Makassar, 13 April 2016
6 Rajab 1437

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M.Hi	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Achmad Musyahid, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. M. Tahir Maloko, M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Dudung Abdullah, M. Ag	(.....)



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syaria’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt. Atas limpahan kasih, sayang dan segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis kemudian diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Proses penyelesaian skripsi ini tidaklah terlepas dari bantuan dan hukuman dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muh. Sabir Dg Talli, S. Sos dan Ibunda Hj. Saeba. K Dg Te'ne, S. Pd atas romantisme keluarga, kesabaran dalam memberikan dukungan secara moral dan finansial.
2. Prof. Dr Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M. Si dan Ibu Dr. Kurniati, M. Hi. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas ketersediaan sarana dan prasarana secara akademis maupun secara administratif yang memudahkan terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Parman, MA dan Bapak Dr. Dudung Abdullah, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak terima kasih banyak

atas arahan dan petunjuk sebagai pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Univerrstas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas segala teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar.
6. Kakanda Letnan Satu Inf. Muh. Syaldi Sabir Dg Lalang, Wahyuni S Dg Simba, dan adinda Syahrani Sabir Dg Lu'mu atas segala dukungan serta motivasi yang tidak pernah habis diberikan.
7. Kakak Syamsi Machmoed (Kak Canci) selaku staf Jurusan yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan surat-surat dalam sistem penyelesaian skripsi.
8. Wardiya Putri Tadjuddin atas simpati, motivasi dan semangat yang tidak pernah bosan untuk selalu diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan: Abd Rahman K, Muh. Fadli Rahman, Muhammad Nur, Muhammad Ghazy Ahkam, Nur Al Qadri Ismail, Bijaksana, Muhammad Rifaldy Syamjaya Akbar Ali, Iqdam Mukaddim Ikbal, Albar Zainal, Kakanda Abdurrahman Supardi Usman, Sardini S. Pd, Amrullah Nur Hidayat, Adinda Muhammad Nur Sahadat dan Idhan Khalik, serta saudara-saudari di Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Angkatan 2012 tanpa terkecuali. Oleh karena motivasi, empati inspirasi dan kontribusi yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Mr. Leonard Kleinrock (Penemu Internet), Mr. Lawrence Edward Page dan Mr. Sergey Mikhailovich Brin (Pendiri Google), Mr. Lawrence G.

Tesler (penemu cut/copy-paste), serta Mr. Charles Simonyi (Penemu Office Word) atas inovasi dan penemuannya yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu.

Pengharapan yang sangat besar agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan hukum di Indonesia, baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Walaupun skripsi ini tak mampu menyentuh kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Jika terdapat banyak kesalahan dalam skripsi ini, tidak lain kesalahan yang berasal dari dalam diri, jika ditemukan kebenaran sesungguhnya semua itu hanyalah milik Allah swt. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah swt. selalu menaungi kita sekalian dengan rahmat-Nya dan semoga apa yang telah dikerjakan bernilai amal ibadah disisi Allah swt. Amin.

Makassar, 17 Maret 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Penulis
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13-44
A. Otonomi Daerah	13
B. Peraturan Daerah	15
C. Zakat	17
D. Perspektif Yuridis, Politis dan Konstitusional.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45-48
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
G. Pengujian Keabsahan Data	48
BAB IV IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR	49-71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
B. Implementasi Perda Zakat	54
1. Landasan Filosofis	55
2. Landasan Perundang-Undangan	60
C. Kontinuitas Implementasi.....	71

BAB V PENUTUP	74-75
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أُ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وْ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاَتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يُ), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzhah</i>)
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاِلٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

swt. = *Subhanahu wa Ta'āla*

saw. = *shallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4

HR = Hadis Riwayat

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman



ABSTRAK

Nama : Muh. Sadli Sabir

Nim : 10300112019

Judul : **IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR
(ANALISIS YURIDIS, POLITIS DAN KONSTITUSIONAL)**

Rumusan masalah berupa bagaimana Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif Yuridis Konstitusional? dan Bagaimana Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif Politis?

Penelitian ini selain berjenis penelitian hukum normatif, juga mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif. Sedangkan secara metodik, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Adapun menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, politis dan pendekatan konstitusional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Perda Zakat di Kabupaten Takalar merupakan bentuk transformasi norma yang bersumber dari hukum Islam menjadi kaidah hukum positif. 2). Perda zakat di Kabupaten Takalar legal ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkoordinasi dengan Kepolisian. Berdasarkan elaborasi penulis, tidak ditemui pelanggaran konstitusional oleh Perda Zakat tersebut. Lahirnya Perda tersebut didasari inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk mengakomodir sistem ekonomi Islam masyarakat Takalar yang mayoritas beragama Islam

Kekurangan dalam pelaksanaan perda zakat tersebut ditemui pada lemahnya penegakan akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah menghadirkan perspektif baru terkait Peraturan Daerah. Bahwa benar secara positivistik Perda yang bernuansa religius tidaklah termasuk dalam hukum nasional. Akan tetapi Peraturan Daerah dengan nuansa religius adalah benar pula adanya dan nyata implementasinya. Selain itu, menghadirkan pula perspektif baru terhadap base line Perda bernuansa religius di Kabupaten Takalar bukan sebatas berasal dari ajaran agama Islam, melainkan juga berasal dari budaya masyarakat Kabupaten Takalar. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Kab.Takalar agar penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Takalar dapat dijalankan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup keberlakuannya, tidak parsial dan tidak bersifat sementara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Takalar yang beribukota di Kecamatan Pattallassang terletak antara 5°3'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Sebelah timur secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan di batasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.¹

Jumlah penduduk di Kabupaten Takalar berdasarkan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum 2012 (DAU2012) mencapai 275.034 (dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh empat) jiwa. Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut, 272.137 diantaranya adalah penduduk yang beragama Islam. Ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Takalar yang beragama Islam mencapai persentase 98,94%.²

Dengan persentase penduduk muslim di Kabupaten Takalar yang mencapai 98,94% membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Takalar adalah mayoritas Muslim. Sebagai daerah mayoritas Muslim, pemerintah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama di dalam hal beragama, maka penting bagi pemerintahan Kabupaten Takalar menciptakan aturan-aturan dalam hal beragama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakatnya. Aturan-aturan ini kemudian diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013* (Takalar: BPS Kabupaten Takalar, 2012), h. 1.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 201*, h. 151.

Pada era modernisme hukum sekarang ini, ada kemungkinan peraturan daerah digunakan sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman serta kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan berbagai macam perda, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah menciptakan satu perda yang mengarahkan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah agama. Seperti halnya dengan pemerintah Kabupaten Takalar yang mengeluarkan peraturan daerah yang bernuansa religius yaitu Peraturan Daerah Kab. Takalar Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat.

Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengeluarkan perda zakat ini, tidak hanya melihat dari pendapatan masyarakatnya, tetapi juga mempertimbangkan bahwa Kabupaten Takalar adalah Kabupaten yang masyarakatnya mayoritas muslim dengan jumlah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun landasannya menurut hukum Islam yaitu terdapat dalam QS al-Ma'arij/ 70: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).³

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.⁴

Perkembangan keilmuan yang semakin pesat diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan berbagai ragam, maka tidak bisa disamakan kehidupan manusia sebelum masehi begitupun di zaman Rasulullah. Pada zaman

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil, 2013), h. 569.

⁴Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h. 4.

Rasulullah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat saat itu hanya kegiatan ekonomi yang sederhana. Sangat berbeda dengan sekarang, kegiatan ekonomi yang ada sekarang sudah memiliki beragam model, seperti akad-akad (model-model transaksi). Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut.⁵

Qardhawi dengan karyanya *Fiqh Zakat*, menjelaskan bahwa semakin pesatnya perkembangan perekonomian, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat terkhusus lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada *nash* yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum namun tetap relevan dengan kaidah pengelolaan zakat.⁶

Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena berkaitan dengan harta benda dan pengelolaannya, sehingga apabila zakat ini didayagunakan dan diberdayakan dengan cara yang tepat dan benar akan mampu membantu menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila diperhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, maka kedua ibadah pokok ini hampir dikatakan selalu berdampingan. Didalam al-Qur'an, tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah menyebutkan kata zakat beriringan dengan menyebut kata shalat. Ini membuktikan bahwa shalat dan zakat merupakan dua

⁵Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, h. 15.

⁶Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, h. 16.

ibadah yang memiliki hubungan yang sempurna. Zakat adalah seutama-utama ibadah *maliyah* dan shalat seutama-utama ibadah *badaniyah*.⁷

Begitu penting kedudukannya dalam Islam, sehingga zakat dan shalat dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai lambang yang mewakili keseluruhan ajaran Islam. Dengan kata lain seseorang sudah dianggap memenuhi syarat minimal sebagai seorang muslim apabila sudah melaksanakan shalat dan membayar zakat. QS At-Taubah/ 9:11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁸

Kehadiran perda ini tentunya menjadi media pelengkap dan pendukung terwujudnya ekosistem syariat dalam kehidupan bermasyarakat Kabupaten Takalar terkhusus di bidang pengelolaan zakat. Apabila perda zakat ini diterapkan dengan baik oleh pemerintah, maka akan tercipta masyarakat yang terhindar dari garis kemiskinan, selain itu juga membantu dalam hal pembangunan di daerah tersebut.

Dengan Lahirnya Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tanggal 23 September 1999, kemudian undang- undang ini diamanden menjadi UU RI No 23 Tahun 2011, walau tidak ada kata terlambat, hal ini banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tatanan perekonomian yang kuat. Sebagai tindak lanjut undang

⁷M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 15.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 188.

undang ini maka Menteri Agama Mengeluarkan Keputusan Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan sebagai petunjuk teknis telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁹

Patut disyukuri, walaupun terjadi tarik-menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) setelah lahirnya undang-undang tersebut. Ditambah lagi dengan adanya perubahan atas UU No. 17 Tahun 2000 yang disahkan tanggal 2 Agustus 2000 tentang perubahan ketiga atas UU RI No 7 Tahun 1983 dimana zakat menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan.¹⁰ Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada umat Islam bahwa zakat akan dikelola dengan baik, walau tidak sedikit kekhawatiran bahwa undang-undang itu hanya sebuah gerakan yang setengah hati yang hanya membesarkan hati umat Islam dan akan berhenti di tengah jalan.

Dilihat secara sepintas semangat yang sama dapat dirasakan saat menyandingkan antara aturan hukum formal dan aturan Syariat Islam. Namun dengan telaah lebih jauh tentunya pelaksanaan perda zakat di Kabupaten Takalar akan diperhadapkan pada berbagai kendala: apakah norma agama patut dan boleh disinkronisasikan dalam kaidah hukum di Indonesia?. Padahal konstitusi dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 jelas menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.¹¹ Asing di telinga kita

⁹Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat DI Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 32.

¹⁰Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat DI Indonesia*, h. 32.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab XI, pasal 29.

ketika mendengar norma agama dijadikan sebagai kaidah hukum. Apakah sesuai dengan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Takalar ?

Setiap implementasi akan memicu kelahiran perspektif yang beragam, demikian pula halnya implementasi perda zakat di Kabupaten Takalar ini, tentunya dapat dianalisa dari berbagai perspektif pula. Dalam perspektif konstitusional misalnya, bahwa apakah kehadiran perda zakat yang mengatur dimensi keagamaan tidak menjadikan sebagai sebuah bentuk tumpang tindih kewenangan. Bukankah melalui UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara telah mengatur bahwa urusan agama menjadi salah satu dari enam urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat.¹²

Bukankah norma agama menjadi salah satu faktor kuat dalam perkembangan hukum di Indonesia. Norma agama menurut Kamsil adalah sebuah aturan hidup berupa perintah, larangan, dan anjuran yang diterima manusia dari Tuhan. Para pemeluk agama meyakini bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan menuju jalan hidup yang benar.¹³ Jika norma agama adalah sebuah norma hukum yang sakral, apakah norma agama itu harus diciptakan sebagai kaidah hukum ?

Salah satu ciri norma agama adalah sanksi yang bersifat ukhrawi yang direpresentasikan dalam bentuk dosa dan siksaan. Norma ini mengikat dengan iman bahwa pelanggaran akan diganjar di akhirat kelak. Hal ini menjadi jiwa dari setiap norma agama dalam masyarakat bahwa imanlah yang menjadikan norma agama

¹² Ada enam yang menjadi urusan pemerintahan pusat yaitu, politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Lihat Republik Indonesia, *Undang undang Republik Indonesia* Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BAB IV, Bagian II, Pasal 10, Ayat 1.

¹³ C.S.T. Kamsil dan Christine S.T. Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 52.

menjadi berbeda dan sakral. Namun dalam konteks sekarang ini, sakral iman tersebut nampak terlewatkan oleh keadaan yang mengharuskan intervensi oleh perda dalam mengatur perilaku keimanan masyarakat beragama seperti taatnya seseorang karena takut kepada sanksi pemerintah, atau takut kepada Allah. Hal ini disebabkan oleh hukum formal yang mengharuskan umat beragama memahami dan menjalankan hukum agamanya sesuai interpretasi Pemerintah Daerah terhadap aturan agama tersebut.

Kekhawatiran itu ternyata terbukti dengan terjadinya banyak kendala dalam sosialisasi, realisasi dan teknis menjadi faktor yang sangat dominan dalam terjadinya *stagnan* undang-undang tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi ? karena mungkin masyarakat melihat dengan kaca mata sinis terhadap pemerintah dalam menerapkan konsep zakat, dengan mengatakan, bahwa undang-undang zakat yang ada hanya sebagai gerakan setengah hati. Dapat dilihat dengan beragam kelemahan yang ada pada UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan sebagai pengurang pembayaran pajak apabila sudah membayar zakat bagi umat Islam, karena sebetulnya hanya merupakan usaha *excuse* dari aparat ditjen pajak untuk menunjukkan toleransi birokrasi terhadap ketentuan berzakat umat Islam.

Menarik untuk diteliti mengenai perda zakat Kabupaten Takalar yang implementasiannya di tengah masyarakat. Apakah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Takalar sesuai dengan hukum, dalam arti sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan?, Apakah keberadaan dan pengimplementasiannya dapat diterima dan tidak bermasalah secara konstitusi ataukah sebaliknya?. Apakah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan perda ini sesuai dan cocok dengan

tuntutan *socio-religi* dalam keadaan sekarang ataukah keberadaannya hanya bagian dari alat rekayasa sosial?.

Dari latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka disusunlah ke dalam skripsi yang berjudul: “Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dari latar belakang yang telah dibahas tersebut maka, tercapailah fokus penelitian sebagai berikut:

1. Perda Zakat di Kabupaten Takalar.
2. Perspektif yuridis konstitusional dan politis terhadap Perda Zakat di Kabupaten Takalar.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam point-point fokus tersebut, maka fokus penelitian tersebut terdahulu dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹⁴. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu.¹⁵ Penggunaan kata zakat dalam pergaulan bahasa Indonesia

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Teknis Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 2.

¹⁵Muhammad Shuhufi, *Pembacaan Fiqih Sosial atas Fikih Ibadah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 181.

selanjutnya menjadi lekat dengan harta yang dikeluarkan dalam keadaan tertentu sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan. Adapun dalam penulisan skripsi ini, kata zakat disandingkan dengan kata perda sehingga menjadi sebuah frasa tersendiri yaitu perda zakat. Frasa perda zakat dihadirkan sebagai representasi dari peraturan-peraturan daerah di Kab. Takalar yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun perspektif yuridis konstitusional terkait bagaimana perda zakat di Kabupaten Takalar menjalankan fungsi penerapannya dalam dimensi sistem hukum¹⁶ dan dimensi konstitusional atau sesuai dengan undang-undang suatu negara¹⁷. Sedangkan perspektif politis yang dimaksudkan adalah cara pandang terkait apa yang menjadi landasan kebijakan lahirnya perda tersebut dan bagaimana pencapaian maksimal dalam implementasinya. Disebutkan juga bahwa politis yaitu prinsip-prinsip yang mengatur tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dapat menimbulkan pokok masalah yaitu: “Bagaimana implementasi perda zakat di Kabupaten Takalar. Setelah itu muncullah sub-sub masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi perda zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis konstitusional?
2. Bagaimana implementasi perda zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis?

¹⁶M. Marwan dan Jimmi P, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651.

¹⁷M. Marwan dan Jimmi P, *Kamus Hukum*, h. 651.

¹⁸Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat DI Indonesia*, h. 2.

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul “Implementasi perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)”, dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa buku yang dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun buku-buku tersebut adalah:

1. Hubungan antara Negara dan Agama (Studi Pemikiran Buya Hamka) karya Ahmad M. Sewang. Buku ini membahas tentang ciri khas agama Islam terkait hubungan agama dan negara. Paham sekuleris yang bermaksud memisahkan antara fungsi-fungsi negara dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi agama, tidaklah berlaku pada Islam. Oleh karena kompleksitas Islam tidaklah sekedar agama dalam arti religi, tetapi mencakup ideologi dan kehidupan secara universum. Dalam Islam, menegakkan kebenaran dan menjalankan keadilan adalah sebuah kewajiban syariat yang penting dan asasi. Selanjutnya jika dalam pelaksanaan dari kewajiban itu tidaklah mungkin dapat tercapai secara koheren tanpa adanya *tool of social engineering*, maka pengadaan alat tersebut (berupa kaidah hukum) dengan sendirinya menjadi sebuah kewajiban.¹⁹ Buku ini hanya menjelaskan relasi antara agama dan negara, tapi tidak menjelaskan tentang tranformasi hukum Islam ke hukum nasional.
2. Pengelolaan Zakat disertai Cara Perhitungannya oleh Ali Parman. Dikemukakan bahwa dimensi perilaku taat berzakat dipengaruhi oleh empat indikator. Pertama, motivasi taat berzakat didorong oleh rasa cinta kepada Allah. Kedua, passport taat dalam berzakat karena mendambakan kesucian, jaminan keselamatan dan kepastian hukum. Ketiga, tujuan masyarakat dalam berzakat karena ingin

¹⁹Ahmad M. Sewang dan Syamsudduha Saleh, *Hubungan Agama dan Negara (Studi Pemikiran Buya Hamka)* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 67.

mendapatkan hidup yang sejahtera dan memelihara keluarga dengan harta. Keempat, etika dalam perilaku berzakat agar menjadi pribadi yang hemat.²⁰

3. Hukum Pemerintahan Daerah oleh Martin Jimung. Mengemukakan bahwa otonomi daerah dipilih dalam sebuah negara kesatuan dengan beberapa alasan, antara lain: membebaskan pusat dari beban mikronasional, keinginan terhadap pemberdayaan lokal, untuk menyalurkan alokasi kewenangan pusat ke daerah, pengembalian kepercayaan pusat ke daerah, dan semangat desentralisasi.²¹ Sejatinya otonomi daerah selain memberikan wewenang pada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, juga memberikan ruang fokus bagi pemerintah pusat untuk berkonsentrasi pada kebijakan strategis makronasional. Buku ini hanya menjelaskan kewenangan pemerintah dibidang kepentingan sosial masyarakatnya, tidak menjelaskan kepentingan agama masyarakatnya.
4. Pedoman Zakat oleh M. Hasbi ash-Shiddieqy. Mengemukakan tentang kedudukan zakat didalam Islam, syarat wajib zakat, orang orang yang berhak menerima zakat. Menjelaskan juga adab-adab zakat serta pedoman pelaksanaan zakat dengan benar menurut Islam untuk tercapainya ibadah baik secara horisontal ataupun secara vertikal dan juga sebagai bentuk pensucian harta. Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kefakiran yang menjadi sumber malapetaka, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat.²² Buku ini tidak menjelaskan tentang penyatuan zakat dalam perda. Hanya menjelaskan tentang peranan zakat sebagai alat untuk mengurangi kefakiran serta tidak ditemukannya pembahasan terkait zakat yang dijadikan sebagai produk hukum.

²⁰Ali Parman, *Pengelolaan Zakat disertai Cara Perhitungannya* (Makassar: Alauudin Press, 2012), h. 211.

²¹Martin Jimung, *Hukum Pemerintahan Daerah*, dalam Hendra Karianga, *Politik Hukum: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 771.

²²M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 265.

5. Ekonomi Zakat: Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer Dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik. Menuturkan bahwa zakat sebagai bagian yang diperintahkan di dalam Al Qur'an, dan karenanya berasal dari Allah swt. dan sekaligus berfungsi sebagai pemegang otoritas dalam memberikan aturan berkaitan kinerja yang seharusnya dikembangkan oleh amil zakat.²³Buku ini tidak menjelaskan bahwa amil zakat yang dibentuk harus sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah saw.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perda zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis konstitusional.
2. Untuk mengetahui implementasi perda zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif politis.

Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

- a. Secara Teoritis

Media pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa/mahasiswi yang berminat mengkaji problematika peraturan daerah yang ada di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Rekomendasi wacana bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan peraturan daerah (perda), baik di Kab. Takalar ataupun daerah lain.

²³Hamzah Hasan Khaeriyah, *Ekonomi Zakat DI Indonesia*, h. 5.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of social Science*, pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹

Secara lebih lanjut, dengan adanya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran-serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam arti daerah diberikan wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun yang menjadi prioritas pemerintah menjalankan otonomi daerah adalah menekankan kepada peningkatan pelayanan masyarakat dalam hal ini sebagai

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, bab IX, pasal 236.

pelaksana adalah birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat yang ada di daerah.

Maka, otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau kewenangan tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan yang berada di daerah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah daerah dilakukan oleh dua lembaga pemerintahan daerah yaitu, kepala daerah dan DPRD.³ Kedua lembaga ini bekerja sama dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan dalam mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat yang ada di daerah.

Kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih oleh secara langsung oleh rakyat secara demokratis yang persyaratannya dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan antara kepala daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan merupakan hubungan kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa kedudukan dari kedua lembaga tersebut yaitu, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, dalam arti tidak ada yang saling membawahi

²Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonom* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers 2015).

³Khaerul Ikram Damanik dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.118.

diantara keduanya. Sedangkan dalam hal kemitraan, kedua lembaga ini bekerja sama membuat kebijakan daerah.⁴

B. Peraturan Daerah (Perda)

Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan sarana untuk pelaksanaan otonomi daerah, agar otonomi daerah bukan hanya konsepsi-konsepsi pemerintah. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sebagai upaya penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas bantuannya.⁵ Dengan kata lain perda adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam desentralisasi politik atau staatskundige decentralisatie terjadi pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di bidang pemerintahan atau regelende en besturende bevoegheiden kepada unit-unit pemerintahan daerah otonom.⁶ Dalam pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan, peraturan daerah sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam relasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif menjadi cerminan dari manfaat otonomi daerah.

⁴Khaerul Ikram Damanik dkk, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, h. 118

⁵Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 295

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

Sedangkan di dalam UU RI No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedang peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁸

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, bab IX, pasal 236.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.⁹

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughah*) berarti: Kesuburan, kesucian, dan keberkahan.¹⁰ Sesuai dengan firman Allah di dalam QS at-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka.¹¹

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹² Menurut UU RI No. 23 Tahun

⁹“Peraturan Daerah,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), (16 Maret 2016).

¹⁰Muhammadiyah Ja'far, *Tuntutan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji* (Cet IV; Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2000), h. 1.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil, 2013), h. 203.

2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Zakat adalah kewajiban semua umat Muslim yang mampu berzakat, dalam hal pengeluaran zakat dari harta yang dimiliki seseorang memiliki dasar hukum atas perintah ini, beberapa ayat al Qur'an menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Diantaranya, yaitu QS Al-Baqarah 2/110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Selain itu, ayat yang lain juga dijelaskan dalam al-Quran tentang siapa yang berhak menerima zakat. Dalam arti, ketika ada yang berhak menerima zakat sudah tentu terletak perintah untuk mengeluarkan zakat. Terdapat dalam QS at-Taubah 9/60:

¹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa, 2010), h. 34-35.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵

Ayat lain juga dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia serta orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Mu'minun/ 23: 1- 4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.¹⁶

Dijelaskan pula dalam QS al-Baqarah/ 2: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 342.

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Dari beberapa dasar hukum yang dijelaskan, ini memberikan isyarat bagi seluruh umat Islam betapa pentingnya untuk mengeluarkan zakat.

b. Hadis

Selain yang dijelaskan dalam al-Qur'an, pembahasan tentang zakat juga terdapat didalam hadits Nabi saw. Dijelaskan pada beberapa hadits Nabi saw. antara lain:

1) Hadis nabi yang menjelaskan zakat melalui salah satu dari tiga dimensi agama Islam. Hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: " الْإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ "...¹⁸

Artinya:

Musaddad telah menceritakan kepada kami dan berkata: Isma' il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Abu> H{ayyan al-Taimi> dari Abu> Zar'ah dari Abu> Hurairah berkata: Rasulullah saw., suatu hari berkumpul kepada manusia dan didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya: "Apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab: iman yaitu beriman kepada Allah

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

¹⁸Muh}ammad bin Isma>'i>l Abu> 'Abdillah al-Buka>ri> al-Ju'fi>, *Sah}i>h} al-Buka>ri>*, Juz I (Cet. I; Da>r T{uq al-Naja>h: t.p., 1422 H), h. 19.

dan malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, para rasul-Nya dan takdir-Nya. Malaikat Jibril kembali bertanya: Apakah yang dimaksud Islam, Rasulullah menjawab: Beriman kepada Allah swt., tidak menyekutukan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa ramadan...

- 2) Hadis Nabi yang menjelaskan bahwa zakat adalah lima dasar didirikannya atau ditegakkannya agama Islam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁹

Artinya:

Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami bahwa: H{anz}alah bin Abi>Sufya>n mengabarkan kepada kami dari 'Ikrimah bin Kha>lid dari Ibn 'Umar r.ahma berkata: "Islam dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji (bagi yang mampu) dan melaksanakan puasa ramadan . . .

- 3) Hadis Nabi yang menjelaskan zakat sanksi yang bersifat ukhrawi bagi yang tidak mengeluarkan zakat.

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالُهُ

¹⁹Muh}ammad bin Isma>'i>l Abu> 'Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju'fi>, *Sah}i>h} al-Bukha>ri>*, h. 11.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَيَّتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) "الآيَةَ²⁰

Artinya:

A bin ‘Abdullah menceritakan kepada kami, Ha>syim bin al-Qa>sim menceritakan kepada kami, ‘Abdu al-Rahman bin ‘Abdullah bin Di>nar menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abu> S{a>lih} al-Samma>n dari Abu> Hurairah r.a., berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Siapa yang dikarunai oleh Allah tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti mereka akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya lalu mematuk dan melilit lehernya dan berteriak kepada orang tersenut “Saya adalah hartamu, saya adalah harta yang kamu timbun-timbun. Kemudian Rasulullah saw., membaca ayat (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) ”.

- 4) Hadis Nabi yang memerintahkan orang kaya mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang miskin.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»²¹

²⁰Muh} ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju‘fi>, *Sah}i>h} al-Buka>ri>*, Juz II, h. 106.

²¹Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, *Sah}i>h} Muslim*, (Da>r Ih} ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>: Beirut, t.th.), h. 50.

Artinya:

A bin Muh}ammad menceritakan kepada kami, Waki' bin Jarra>h} menceritakan kepada kami berkata: Zakariya bin Ish}a>q al-Makki> menceritakan kepada kami dari Yah{ya> bin 'Abdullah bin S{aifi> dari Abu Ma'bad Maula Ibn 'Abba>s dari Ibn 'Abba>s, sesungguhnya Nabi saw., mengutus Mu'az\ ke Yaman dan berkata: Beritahukalah kepada mereka bahwa Allah swt., telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Apabila mereka menaati dalam hal ini, maka periharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.

- 5) Hadis Nabi yang menjelaskan tentang tiga perkara yang dapat menghancurkan seseorang.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ الْحُرَّاسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُهْلِكَاتُ ثَلَاثٌ: إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَشُحُّ مَطَاعٍ، وَهَوَى مُتَّبِعٌ²²

Artinya:

Ibra>him bin 'Abdullah bin al Junaidi mengabarkan kepada kami: Muhammad bin Sulaiman dan Isma>'i>l bin zakariya mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin 'Aun al-Khura>sa>ni> dari Muhmmad bin Zaid dari Zaid bin Jubair dari Ibn 'Abba>s berkata, Rasulullah saw., bersabda: "Tiga perkara yang dapat menghancurkan yaitu manusia memandang hebat akan dirinya, kikir yang diperturukkan dan hawa nafsu yang diperturukkan.

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam zakat.

²²Abu<> Bakr Ah}mad bin 'Amr bin 'Abd al-Kha>liq bin Khala>d bin 'Ubaidillah al-'Atki>, al-Baza>r, *Musnad al-Baza>r*, Juz VIII (Cet. I; Maktabah al'Ulu>m wa al-H{ukm: Madi>nah al-Munawwarah, 2009), h. 295.

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam zakat sehingga umat Islam diperintahkan untuk menunaikan zakat, yang kemudian nilai-nilai tersebutlah ditetapkan sebuah hukum bahwa umat Islam yang telah memenuhi syarat harus menunaikan zakatnya. Diantaranya yaitu:

a. Nilai filosofis

Sebelum melangkah lebih jauh terhadap nilai filosofis yang terkandung di dalam zakat, maka dibutuhkan penalaran filosofis tentang apa yang menjadi makna empirik dari suatu hukum Islam²³. Selain itu, penalaran filosofis juga merupakan upaya penetapan hukum Islam dengan tujuan memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang merusak.

Adapun yang menjadi landasan filosofis kewajiban berzakat yaitu *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah SWT adalah pemilik seluruh isi dunia ini. Secara otomatis Allah juga lah penguasa harta-harta manusia. Sementara manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al Baqarah/ 02: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

²³Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press), h. 199.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."²⁴

Ada beberapa tugas kekhalifahan/*istikhlaf* manusia secara umum diantaranya:

- 1) Tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-An'am/ 06: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

- 2) Tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas sebagaimana yang tercantum dalam QS adz Dzariyat/ 51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²⁶

Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia anugrah sistem kehidupan dan sarana kehidupan sebagaimana dalam QS Luqman/ :20)

²⁴Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 6.

²⁵Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 150.

²⁶Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 523.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.²⁷

Ketika manusia beriman kepada Allah, sudah tentu menyadari bahwa yang menjadi pemilik mutlak dari seluruh harta benda yang berada di langit dan di bumi adalah Allah swt. Konsekuensi dan pemilikan mutlak terhadap harta benda adalah harta tersebut hanya dititipkan oleh Allah kepada manusia dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan Tuhan dalam hal ini yang berkaitan dengan harta tersebut baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya yakni, antara lain kewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kepentingan masyarakat bahkan sedekah dan infak di samping zakat bila hal tersebut dibutuhkan.²⁸

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan islam merupakan hak mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana yang sebutkan dalam QS al-Hadid/ 57: 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

²⁷Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 413.

²⁸Ismail Muhammad Syah dkk, *filsafat hukum Islam* (Cet III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 188.

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.²⁹

Selanjutnya dijelaskan dalam QS an Nur/ 24: 33

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا تَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْفِرَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَّوَةِ
الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.³⁰

Atas dasar inilah Allah SWT menetapkan bagian-bagian tertentu dalam harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat banyak atau anggota-anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sejak semula tuhan telah menetapkan bahwa harta tersebut dijadikannya untuk kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak terlebih jika dikatakan bahwa mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan kemudian Allah

²⁹Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 538.

³⁰Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 354.

menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakannya sesuai kebutuhan masing-masing.³¹

Adapun nilai yang terkandung dalam zakat secara filosofis antara lain:³²

1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhaNya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama dari sifat kikir. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi untuk bekerja, sehingga timbullah rasa ingin memiliki, keinginan untuk memiliki suatu benda dan tetap ingin memilikinya selamlamanya.³³

Ketika umat Islam menunaikan zakat, telah jelaslah bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah. Zakat yang berfungsi untuk mensucikan artinya, sucinya seseorang ditentukan oleh kemurahan dan pemberiaannya, dan ditentukan juga oleh kegembiraan ketika harta, semata karena Allah.³⁴ Hal ini memiliki makna bahwa umat Islam yang mengeluarkan zakatnya seperti membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah uang.³⁵

2) Zakat mengobati hati dari cinta dunia

³¹ Ismail Muhammad Syah dkk, *filisafat hukum Islam*, h. 188.

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 849.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 849.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 850.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 850.

Sesungguhnya Allah mengingatkan manusia bahwa harta itu hanyalah sekedar alat, bukan tujuan. Allah mengizinkan kepada umat Islam untuk mengumpulkan harta, membolehkan kehidupan yang baik, akan tetapi Allah tidak mengizinkan jika manusia hanya berhenti di kehidupan harta saja.³⁶ Dengan zakat, berarti melatih umat Islam melawan fitnah dari harta dan fitnah dari dunia, dengan mempersiapkan jiwa untuk menyerahkan harta, semata karena menuruti perintah Allah dan mencari ridhaNya.³⁷

b. Nilai sosiologis

Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat memiliki peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan tersebut apabila terkelola dengan profesional.

Sekarang banyak jaminan sosial seperti asuransi dan berbagai macam bantuan sosial yang disediakan oleh negara atau ditawarkan oleh perusahaan komersial. Namun, zakat lebih menjanjikan sebab dasar pandangannya bukanlah kesetiakawanan sosial saja, namun berdimensi spritual.³⁸

Adapun nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kewajiban berzakat antara lain:

- 1) Zakat membebaskan *mustahiq* dari kebutuhan.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 859.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 860.

³⁸Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007). h.

Agama Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.³⁹

Adapun Islam telah menetapkan sasaran, di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia tidak boleh disibukkan hanya untuk mencari roti, akan tetapi untuk mengenal Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dari sinilah Allah telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang fakir, yang kemudian digunakan oleh orang fakir untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

Manusia, apabila kefakiran telah melelahkannya dan kebutuhan hidup menyimpannya, sementara di sekitarnya mereka melihat orang-orang yang hidup dengan bersenang-senang, hidup dengan leluasa, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam kefakiran, akan

³⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 867.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 868.

membuat hati orang fakir tersebut timbul perasaan benci dan murka kepada masyarakat yang mebiarkannya, tidak peduli dengan urusannya.⁴¹

3) Zakat menarik rasa simpati dan cinta

Zakat mampu menciptakan sebuah ikatan antara orang yang kaya dengan masyarakatnya, yaitu ikatan yang kuat, ikatan yang penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Ketika manusia mengetahui bahwa ada orang lain yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, maka secara naluri mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya.

Demikian pula halnya dengan orang fakir, jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak pasti orang yang fakir akan mendoakannya.⁴²

4. Syarat sahnya berzakat

a. Orang-orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat

Menurut kesepakatan ulama, ada beberapa persyaratan bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Antara lain⁴³:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Telah sampai umur
- 4) Berakal
- 5) dan *nisab* yang sempurna.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 873.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 861

⁴³M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 17.

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

1) Milik penuh⁴⁴

Pada hakikatnya, kekayaan hanya milik Allah. Namun, kekayaan yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada manusia yang kedudukannya hanya sebagai penguasanya (amanah), sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-H{adi>d/ 57: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang telah Allah berikan kepada manusia dengan kedudukan sebagai penguasa harta agar dinafkahkan di jalan Allah.

2) Berkembang

Selain harta yang dimiliki secara penuh, syarat yang harus dipenuhi adalah harta yang berkembang atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam arti memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan.⁴⁶

3) Cukup senisab

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 125.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 538.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 138.

Islam memberikan ketentuan bagi harta yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan jumlahnya.

- 4) Lebih dari kebutuhan biasa
- 5) Bebas dari hutang.

5. Pajak dan zakat

a. Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah yang berasal dari kata yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁴⁷

b. Perbedaan Zakat dan Pajak

Sebagai sumber keuangan negara, pajak dan zakat memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah zakat digunakan dalam konsep agama Islam, sementara pajak digunakan secara universal tanpa melihat agama masyarakat. Adapun beberapa perbedaan antara zakat dan pajak yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* antara lain:

- 1) Dari segi istilah, zakat memiliki arti suci, tambah dan berkah. Zakat secara lahir mengurangi harta, namun di mata Allah swt., zakat dapat tumbuh dan bertambah. Sedangkan pajak dalam bahasa arab diartikan sebagai al- Dharibah, yang artinya utang, pajak tanah, yang wajib dilunasi. Melihat pengertian tersebut, memiliki kesan bahwa pajak adalah suatu beban yang dipaksakan.

⁴⁷Zulfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 27.

- 2) Zakat adalah ibadah kepada yang diwajibkan kepada seluruh umat islam sebagai bentuk tanda syukur dan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah. Sedangkan pajak adalah kewajiban seluruh warga negara baik muslim maupun non muslim.
- 3) Ketentuan zakat berasal dari Allah dan Nabi Muhammad. Sedangkan pajak berasal dari kebijakan pemerintah.
- 4) Zakat merupakan kewajiban yang permanen. Sedangkan pajak bisa berkurang, atau bertambah, dan bisa saja dihapuskan tergantung dengan kebijakan penguasa.
- 5) Penerima zakat telah dibagi menjadi delapan golongan didalam al Quran. Sedangkan penyaluran pajak sesuai dengan kebutuhan negara.
- 6) Maksud dan tujuan zakat yaitu sebagai pembinaan spritual. Sedangkan tujuan pajak adalah kesadaran dan mengemban perintah penguasa.

Sementara Yusuf Qardhawi mengungkapkan beberapa perbedaan zakat dan pajak antara lain:

- 1) Dari segi nama

Kata zakat menurut bahasa, memiliki arti suci, tumbuh, dan berkah. Bila dikatakan *zakat nafsuh* artinya, jiwanya bersih. *Zakaz-zar'u* artinya tanaman itu tumbuh. *Zakatil-Buq'ah*, artinya tanah itu berkah.⁴⁸ Artinya, setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah dan berkembang. Demikian juga bagi *muzakki*⁴⁹. Hal ini dijelaskan dalam QS Al-Ruum 30/39:

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 998.

⁴⁹Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 56.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁵⁰

Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara bahasa diartikan sebagai beban. Dalam beberapa kondisi pajak sering disebut sebagai *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti) yang diserahkan oleh ahli *dzimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran tetapi tunduk kepada pemerintahan Islam) kepada pemerintahan Islam. Hal ini digambarkan dalam QS at-Taubah/9: 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁵¹

2) Dari segi dasar hukum dan sifat kewajibannya

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash yang bersifat qathi', yang kewajibannya bersifat mutlak dan absolut dan sepanjang masa. Sedangkan pajak

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

keberadaanya bergantung kepada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang.⁵² Sementara itu hukum pajak di Indonesia bersumber dan berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 yaitu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

3) Dari Sisi Objek dan Persentase Kemanfaatan

Nizab untuk orang yang berzakat sifatnya baku, yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki dan pemanfaatannya harus kepada delapan asnaf yang digambarkan dalam QS Al-Taubah ayat 60.⁵³ Sedangkan aturan pajak sangat bergantung dari objek pajaknya.

c. Persamaan zakat dan pajak

1) Unsur paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, maka diwajibkan untuk berzakat, tidak bisa ditawar lagi. Demikian juga dengan pajak apabila ada warga negara yang sudah termasuk dalam wajib pajak maka harus membayar pajak. Bentuk paksaannya yaitu apabila wajib pajak lalai membayar pajak maka dikenakan sanksi, yaitu peringatan teguran, surat paksa dan penyitaan.

2) Unsur Pengelolaan

Yaitu terdapat dalam QS Al-Taubah 9/60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

⁵²Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 57.

⁵³Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 58.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁴

Asas pengelolaan zakat yang terdapat pada QS at-Taubah 09/60 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bukanlah dilakukan oleh individu akan tetapi dilakukan oleh amil zakat. Demikian juga dengan pengelolaan pajak, pemerintah membentuk lembaga pengelola pajak.

3) Dari sisi tujuan

Zakat bertujuan menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Demikian halnya dengan pajak yaitu berfungsi untuk pembiayaan pembangunan sebagai bentuk pensejahteraan masyarakat banyak.⁵⁵

d. Lembaga Pengelola Zakat

1) Urgensi lembaga pengelolaan zakat.

Ketika membahas tentang zakat, tidak lepas dari campur tangan lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat dijelaskan dalam QS At Taubah 9/60:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

⁵⁵Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 53.

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁶

Pada ayat tersebut, ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Salah satu diantaranya adalah amil zakat. Setelah dijelaskan dalam Al Quran tentang amil zakat, maka selanjutnya dijelaskan tentang perintah sekaligus sebagai tugas yang harus dilaksanakan oleh amil zakat. Yaitu dalam QS At-Taubah 9/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵⁷

e. Pembayaran Zakat dan pajak

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan zakat, tetapi dianjurkan juga untuk berinfak, dan bersedekah yang tidak terbatas jumlahnya, serta pemanfaatannya secara universal atau secara luas. Mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.⁵⁸ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al Baqarah 2/195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 204.

⁵⁸Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 60.

Terjemahnya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁹

Sementara dalam hal pembayaran pajak, ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang dan wajib ditunaikan untuk warga negara. Pemanfaatan dari hasil pembayaran pajak, digunakan juga secara universal seperti pembangunan diberbagai bidang dan sektor serta segala kebutuhan masyarakat secara luas, seperti sarana dan prasarana transportasi, keamanan dan pertahanan.⁶⁰

Kemudian timbul pertanyaan, apakah pajak dapat menggantikan zakat sebagai kewajiban individu?. Pajak dan zakat memiliki banyak persamaan dan perbedaan, dari perbedaan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pajak dalam konsepsi bernilai universal sedangkan zakat bernilai spritual, dengan kata lain pajak tidak boleh menggantikan zakat, sedangkan zakat boleh menggantikan pajak.

D. *Perspektif Yuridis, Konstitusional dan Politis*

1. *Perspektif Yuridis*

Menurut perspektif bahasa, yuridis dapat diartikan sebagai padanan kata hukum. Dapat pula diartikan sebagai sifat sesuatu menurut hukum atau dapat pula berarti secara hukum atau dari segi hukum.⁶¹ Tetapi sebelum itu, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah pengertian hukum. S.M. Amin, S.H mengemukakan pengertian

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

⁶⁰Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 53.

⁶¹M. Marwan, Jimmy p, *Kamus Hukum*. h. 651.

hukum yaitu kumpulan peraturan- peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, dan tujuan hukum ialah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁶² Sementara kajian yang digunakan lebih ditekankan kepada teori Lawrence Meir Friedman, yang mengatakan bahwa hukum yang utuh itu adalah adanya struktur hukum, substansi hukum, dan unsur budaya hukum.⁶³

Sementara itu Prof. Purbacaraka menjelaskan bahwasanya dalam arti materil, Undang-undang memiliki beberapa asas atas peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Yaitu,

- a. Asas 1: Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya Undang-undang hanya bisa mengikat untuk waktu yang akan datang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut serta Undang-undang hanya boleh diberlakukan setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut dan tidak berlaku pada peristiwa sebelumnya.
- b. Asas 2: Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Artinya, sebelum membuat suatu peraturan perundang-undangan terlebih dahulu melihat tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Asas 3: Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, ketika terjadi suatu peristiwa yang disebutkan secara khusus

⁶²Jimly AshShiddiqey, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 98.

⁶³Friedman, *American Law: as an Introduction*, dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 11.

⁶⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, h. 150.

dalam Undang-undang sementara peristiwa tersebut termasuk dalam peristiwa yang dijelaskan secara umum maka, yang digunakan adalah Undang-undang yang bersifat khusus.

- d. Asas 4: Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*). Artinya Undang-undang yang memiliki fungsi serta kedudukan yang sama sementara dikeluarkan pada saat yang berbeda, maka Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang yang terbaru.
- e. Asas 5: Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya, Undang-undang tidak dapat diuji material dengan cara menguji apakah bertentangan dengan Undang-undang dasar atau tidak, hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat Undang-undang tersebut.
- f. Asas 6: Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian terkait perda zakat di Kabupaten Takalar dengan melirik hukum dalam sebuah sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman M Lawrence dan asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Perspektif Konstitusional

Istilah Konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berkaitan “hukum dan prinsip”.⁶⁵

Ferdinand Lasalle membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian sosiologis dan politis (*sociologische* atau *politische* begrip). Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de riele machtsfactoren*), yaitu misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (*preassure groups*), partai politik dan sebagainya. Dinamika hubungan diantara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi.
- b. Pengertian yuridis (*juridische* begrip). Konstitusi dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.⁶⁶

Prof. Carl Schmitt mengemukakan konstitusi kedalam delapan interpretasi. dua diantaranya Yaitu:

- a. Konstitusi dalam arti absolut (*Absolute Verfassugsbegriff*) sebagai *Norma-normarum* (*Norm de Normen*); yaitu: norma dasar adalah norma yang menjadi dasar bagi terbentuk dan berlakunya norma hukum lainnya.
- b. Konstitusi dalam arti relative (*Relateve verfassungsbegriff*) sebagai konstitusi dalam arti materil (*constitutite in materiele Zin*); yaitu: dimaksudkan sebagai

⁶⁵Jimly AshShiddiqey, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. h. 95.

⁶⁶Jimly AshShiddiqey, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 98.

konstitusi yang terkait dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat (*proses relativering*).

Konstitusi dalam kaitannya dengan keberadaan perda zakat di Kabupaten Takalar mengarahkan kesan interpretasi konstitusi dalam arti absolut yaitu *norma-normarum* yaitu implementasinya terkait adanya dasar hukum yang dijadikan sebagai pembentukan hukum lainnya. Dalam hal ini tentunya berdasar pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat dan konstitusi dalam arti materil yaitu konstitusi yang implementasi turunannya terkait erat dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini tentunya komunitas masyarakat muslim di Kabupaten Takalar sebagai masyarakat mayoritas. Selanjutnya menjadi menarik untuk ditelaah dan diteliti terkait keberadaan Perda Zakat di Kab. Takalar, Apakah sesuai dengan Konstitusi atau tidak.

3. Perspektif Politis

Arti politis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *policy* atau kebijakan. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *goverment* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *govenance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Istilah politis terkait penggunaannya dalam penelitian ini tidaklah merujuk kepada istilah politik praktis melainkan politis dalam interpretasi terkait kebijakan publik terhadap implementasi dari keberadaan perda zakat di Kab. Takalar yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar

Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.⁶⁷

Bridgeman dan Davis menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki tiga dimensi⁶⁸ yaitu:

1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan

Kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

⁶⁷Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 1.

⁶⁸Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, h.3.

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam system pemerintahan. Keputusan ini mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

Meskipun demikian, keputusan-keputusan legal belum tentu dapat direalisasikan seluruhnya. Selalu saja ada ruang atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara apa yang sudah direncanakan dan apa yang akan dilaksanakan. Kebijakan sebagai keputusan legal juga tidak berarti bahwa pemerintah selalu memiliki kewenangan dalam menangani berbagai isu. Setiap pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintah terdahulu. Rutinitas birokrasi yang diterima biasanya merefleksikan keputusan kebijakan lama yang sudah terbukti efektif jika diterapkan. Dalam konteks ini, adalah penting mengembangkan proses kebijakan yang partisipatif dan dapat diterima secara luas sehingga dapat menjamin bahwa usulan dan aspirasi masyarakat dapat diputuskan secara teratur dan mencapai hasil yang baik.

3. Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab akibat.

Selanjutnya dapat dilihat dan diteliti terkait landasan politis lahirnya perda zakat tersebut yang tentunya berkesinambungan dan berkorelasi erat dengan sejauh

mana pemerintah daerah Kab. Takalar mempertahankan eksistensi dari perda yang telah dilahirkannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Ditinjau dari perspektif penelitian ini adalah penelitian hukum, penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif, dan mengakomodasi penelitian hukum empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kualitatif. Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louise Kiddler mengemukakan bahwa penelitian evaluatif formatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari sebuah produk, program atau kebijakan yang menekankan pada efektivitas dari produk, program atau kebijakan tersebut.¹ Sedangkan menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan atau asosiasi dengan variabel lainnya.² Adapun lokasi penelitian berlangsung di Kabupaten Takalar.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Secara sederhana dalam KBBI, yuridis berarti sesuai hukum dan menurut hukum. Meskipun denotasi kata yuridis lebih mengacu pada hukum nasional, akan tetapi pendekatan yang dilakukan termasuk pula kata yuridis yang berkonotasi pada hukum Islam yang biasa disebut juga Syar'i. Selain menggunakan pendekatan

¹Louise Kiddler, "Research Methods in Social Relation", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Cet. XII; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.

²Louise Kiddler, "Research Methods in Social Relation", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, h. 11.

yuridis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan politis dan pendekatan konstitusional.

C. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang terdiri atas:

1. Data Primer

Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris.

2. Data Sekunder

Berupa berbagai referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Referensi yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis (nasional maupun Islam), *database software* dan artikel (*online* maupun *offline*).

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Elaborasi

Berupa penggarapan secara tekun dan cermat terhadap data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis, konstitusional dan politis guna memahami substansi interpretasi dari data tersebut.

2. Observasi

Berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.

3. Wawancara

Berupa proses tatap muka dalam rangka *interview* dengan informan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³

4. Dokumentasi

Berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi bukti dan keterangan (gambar, kutipan, dan bahan referensi lain) sebagai data yang mendukung penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Kuesioner observasi

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam proses observasi. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi di lapangan.

2. Kuesioner wawancara

Merupakan kuesioner yang digunakan dalam wawancara tatap muka dengan informan. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh pewawancara berdasarkan jawaban responden pada saat wawancara.

3. Kamera

4. Alat tulis menulis

5. Alat rekam

³Saryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuhamedika, 2010). h. 61.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif. Selain itu, digunakan juga pengolahan data secara deduktif, induktif dan komparatif.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data atau dengan kata lain validasi penelitian ini dengan cara Trianggulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Lebih spesifik lagi jenis metode trianggulasi yang penulis gunakan adalah trianggulasi teknik. Trianggulasi teknik adalah metode validasi kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan atau kuesioner.⁴



⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 372.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Fisik

Kabupaten Takalar adalah Kabupaten yang secara astronomis terletak antara 5°3'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Di sebelah timur secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan di batasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.¹

Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km² terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah Desa/Kelurahan. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.²

No.	Nama Kecamatan	Luas (KM ²)	Presentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Mangarabombang	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	45,27	7,99
3.	Sanrobone	29,36	5,18
4.	Polombangkeng Selatan	88,07	15,54

¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013* (Takalar: BAPPEDA, 2013), h. 1.

² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013*, h. 1.

5.	Pattallassang	25,31	4,47
6.	Polombangkeng Utara	212,25	37,47
7.	Galesong selatan	24,71	4,36
8.	Galesong	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	15,11	2,67
Kabupaten Takalar		566,51	100,00

Table 1. Luas Kabupaten Takalar berdasarkan Kecamatan.³

2. Deskripsi Antropologis

Masyarakat Takalar terdiri dari berbagai macam latar belakang suku dan etnis. Penduduk asli masyarakat Takalar adalah Suku Makassar. Selain itu banyak juga pendatang dengan latar belakang suku dan etnis lain yang akhirnya menetap di Kabupaten Takalar, seperti Suku Bugis, Mandar, Jawa dan Etnis Tionghoa. Sebagai suku mayoritas dan latar belakang pribumi, adat istiadat Suku Makassar masih cukup kental terasa eksistensinya di Kabupaten Takalar.

Dengan populasi mencapai 275.034 (dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh empat) jiwa, 272.137 (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) jiwa di antaranya beragama Islam.⁴ Dengan kata lain 98,94% penduduk Kabupaten

³Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013*, h. 3.

⁴Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013*, h. 151.

Takalar beragama Islam. Sehingga Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Kabupaten Takalar, menjadikan kesan religiusitas begitu kuat terefleksi di kabupaten yang terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi ini.

3. Sejarah dan Pemerintahan

a. Sejarah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 maka ditetapkanlah Tanggal 10 Februari 1960 sebagai hari jadi Kabupaten Takalar. Sebelumnya, Takalar sebagai onder afdeling yang tergabung dalam daerah swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan *Onder Afdeling* Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jenepono. *Onder afdeling* Takalar, membawahi beberapa *district* (adat *gemen chap*) yaitu:

- 1) *District* Polombangkeng
- 2) *District* Galesong
- 3) *District* Topejawa
- 4) *District* Takalar
- 5) *District* Laikang
- 6) *District* Sanrobone

Setiap *district* diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali *District* Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo. Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar, dilakukan bersama antara pemerintah, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang

ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu:

- a) Melalui lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) swatantra makassar. Perjuangan melalui legislatif ini, dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, masing-masing H Dewakang Dg Tiro, Daradda Dg Ngambe, Abu Dg Mattola dan Abdul Mannan Dg Liwang.
- b) Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H Mak karaeng Dg Manjarungi, Bostan Dg Mamajja, H. Mappa Dg Temba, H Achmad Dahlan Dg Sibali, Nurung Dg Tombong, Sirajuddin Dg Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.⁵

Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belum mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Jeneponto-Takalar dengan Ibukota Jeneponto. Sebagai Bupati Kepala Daerah yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang dan Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang sebagai ketua DPRD.

Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 (dua) Kabupaten masing-masing berdiri sendiri yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten

⁵Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013*, h. viii.

Takalar. Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya, setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar termasuk di dalamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Februari 1960, terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (pertama) adalah Bapak H Donggeng Dg. Ngasa, seorang Pamongpraja Senior.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka *District* Polombangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Polombangkeng Utara, *District* Galesong dijadikan 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, *District* Topejawa, *District* Takalar, *District* Laikang dan *District* Sanrobone menjadi Kecamatan Totallasa (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattallassang (kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 tahun 2007 Tanggal 27 April 2007 dan perda nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (pemekaran Dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara). Sehingga dengan demikian sampai sekarang, Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya. Kesembilan kecamatan ini membawahi sejumlah 76 desa dan 24 kelurahan dengan jumlah penduduknya 275,034 jiwa.⁶

b. Pemerintahan

Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan. Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Takalar terdapat 43 kantor jawatan/instansi. Lembaga Legislatif, DPRD Kabupaten Takalar beranggotakan 30 orang.⁷

B. Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar memiliki peluang yang sangat besar terhadap efektifitas penerapan Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis pengelolaan zakat, dengan adanya. Peluang yang terkait efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 05 Tahun 2003 sangatlah besar, karena masyarakat yang berada di Kabupaten Takalar merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya umat Islam yang taat, hal ini di buktikan dengan perkembangan yang signifikan dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun, seperti data yang diperoleh dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah dana yang terkumpul sebesar 2,659,318,374 rupiah, pada tahun 2015 jumlah dana yang terkumpul sebesar 3,285,229,782 rupiah dan untuk data pada tahun 2016 belum terselesaikan. Adapun yang menjadi sasaran untuk pendistribusian pajak adalah fakir miskin, pendidikan/beasiswa, sarana ibadah, modal kerja ibadah, sosial dan amil zakat. Sementara itu data lembaga zakat yang berada di Kabupaten Takalar

⁶Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013*, h. IX.

⁷Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2013*, h. 14.

yaitu; baznas: 1, UPZ: 103, LAZ: 1, jadi jumlah pengelola zakat di Kabupaten Takalar sampai saat ini menurut data yang terakhir adalah 105 lembaga.⁸

Tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Takalar untuk saat ini dan mungkin untuk yang akan datang adalah bagaimana meyakinkan masyarakat terkait keberadaan perda zakat ini, dan menjelaskan bahwa perda tersebut bukanlah alat rekayasa sosial.

Adapun landasan pengimplementasian perda zakat di Kabupaten Takalar terbagi atas dua yaitu: landasan filosofis (akhirat), sosiologis (dunia) dan landasan perundang-undangan.

1. Landasan Filosofis dan Sosiologis

a) Landasan Filosofis (akhirat)

Dari hasil elaborasi, ditemukan bahwa landasan filosofis pengimplementasian Perda No. 05 Tahun 2003 yaitu perda zakat diterapkan berdasarkan iman dan takwa, sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 2 bahwa perda zakat berazaskan iman dan takwa.

Elaborasi selanjutnya yang menjadi landasan filosofis kewajiban berzakat yaitu *Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah di bumi). Allah SWT adalah pemilik seluruh isi dunia ini. Secara otomatis Allah juga lah penguasa harta-harta manusia. Sementara manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/ 02: 30

⁸Departemen Agama Kabupaten Takalar, *Data Zakat*, 2014-2015.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا
 مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْ
 اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁹

Ada beberapa tugas kekhalifahan/*istikhlaf* manusia secara umum diantaranya:

- 1) Tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-An'am/ 06: 165

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمۡ خَلٰٓئِفَۃًۙ فَاَلۡاَرْضُ وَرَفَعَ بَعْضُكُمۡ فَوۡقَ بَعْضٍۭ ۚ دَرَجٰتٍۭ لِّیَبۡلُوۡكُمۡ فِىۡ مَا
 ءَاتٰكُمۡ ۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِیۡعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Sebagai muslim yang taat masyarakat Kabupaten Takalar tentunya mengetahui bahwa umat manusia diutus untuk menjadi khalifah yang kurang lebih memiliki tugas

⁹Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 6.

¹⁰Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 150.

mewujudkan kemakmuran, tugas ini bukan hanya untuk pemerintah tetapi, juga bagi masyarakat yang turut berperan serta dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, berarti telah mengurangi beban kepada orang yang diberikan bantuan.

2) Tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas sebagaimana yang tercantum dalam QS adz Dzariyat/ 51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹¹

Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah memberikan manusia anugrah sistem kehidupan dan sarana kehidupan sebagaimana dalam QS Luqman/ :20)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.¹²

Sedikit banyaknya masyarakat muslim di Kabupaten Takalar mengetahui hakikat dari harta. Yaitu, harta hanya sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan islam merupakan hak mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan manusia

¹¹Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 523.

¹²Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 413.

hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana yang sebutkan dalam QS al-Hadid/ 57: 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.¹³

b) Landasan Sosiologis (dunia)

Adapun nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kewajiban berzakat antara lain:

1) Zakat membebaskan *mustahiq* dari kebutuhan.

Agama Islam menghendaki, agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki, baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup, dan hati merasa aman dengan nikmat Allah yang memenuhi diri dan kehidupannya.¹⁴

Adapun Islam telah menetapkan sasaran, di belakang kekayaan dan kesenangan hidup, yaitu manusia bisa bertemu dengan Tuhannya. Manusia tidak

¹³Kementrian Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, h. 538.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 867.

boleh disibukkan hanya untuk mencari roti, akan tetapi untuk mengenal Allah dan memperbaiki hubungan denganNya serta mencari kehidupan lain yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dari sinilah Allah telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama Islam, di mana zakat diambil dari orang kaya kemudian diberikan kepada orang fakir, yang kemudian digunakan oleh orang fakir untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵

2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci

Manusia, apabila kefakiran telah melelahkannya dan kebutuhan hidup menyimpannya, sementara di sekitarnya mereka melihat orang-orang yang hidup dengan bersenang-senang, hidup dengan leluasa, tetapi tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka membiarkannya dalam kefakiran, akan membuat hati orang fakir tersebut timbul perasaan benci dan murka kepada masyarakat yang membiarkannya, tidak peduli dengan urusannya.¹⁶

3) Zakat menarik rasa simpati dan cinta

Zakat mampu menciptakan sebuah ikatan antara orang yang kaya dengan masyarakatnya, yaitu ikatan yang kuat, ikatan yang penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Ketika manusia mengetahui bahwa ada orang lain yang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, maka secara naluri mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka akan tertarik kepadanya.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 868.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 873.

Demikian pula halnya dengan orang fakir, jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak pasti orang yang fakir akan mendoakannya.¹⁷

2. Landasan Perundang-undangan

a) Perspektif Yuridis

Negara Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara kesatuan yang menganut sistem negara hukum. Namun akhir-akhir ini ramai dibicarakan pada pelaksanaan otonomi daerah. Banyak daerah yang membuat produk hukum yang berasal dari nilai-nilai Islam. Tidak terkecuali Kabupaten Takalar, padahal pondasi berbangsa dan bernegara bukan berlandaskan dari syariat Islam. Beberapa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Takalar yang berasal dari nilai-nilai Islam. Satu diantaranya adalah Perda No. 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar.

Sungguh terasa asing ketika mendengar bahwa kewajiban dalam berzakat untuk umat Muslim dijadikan sebagai produk hukum atau yang sering disebut sebagai peraturan daerah. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah dengan kehadiran dan pengimplementasian perda zakat di Kabupaten Takalar ini sesuai dengan konsep yuridis atau sesuai dengan hukum yang dimiliki oleh Indonesia ?

Dari aspek yuridis kehadiran perda zakat ini dimulai dari adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan segala kelengkapannya. Namun keberadaan undang-undang ini dianggap belum memuaskan dikalangan masyarakat. Alasannya yaitu dalam Undang-undang tersebut

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 861

tidak memiliki sanksi bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak sebanding dengan pengelolaan pajak. Padahal pajak adalah urusan dunia semata, sementara zakat jelas-jelas diatur dalam al-Qur'an dan hadis untuk urusan dunia dan akhirat.¹⁸

Pembentukan dan pelaksanaan perda zakat yang ada di Kabupaten Takalar merupakan amanah dari undang-undang yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu, UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁹ Semenjak adanya otonomi daerah, dan telah dikeluarkannya UU RI No. 38 Tahun 1999. Maka pemerintah Kabupaten Takalar berinisiatif membuat peraturan daerah tentang Teknis Pengelolaan Zakat yang tidak lain berkiblat dari Peraturan tahun 1999 tersebut.

Sementara perda zakat dikaitkan dengan pendapat Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa hukum adalah:

There is, of course, no "true" definition of law. Definitions flow from the aim Or function of the definer. ... Definitions that equate law with rules allow legal scholarship to ignore empirical questions and justify traditional legal thought.²⁰

Friedman mengungkapkan bahwa hukum merupakan suatu sistem hukum yang di dalamnya terdapat beberapa komponen. Menurut beliau, komponen dari sistem hukum tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum dan unsur budaya hukum. Dalam penjabarannya bahwa struktur hukum merupakan tatanan dan kinerja

¹⁸ Ali Parman, *Pengelolaan Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 30.

¹⁹ Sahlan Gasri (55 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, *Wawancara*, Takalar, 3 Februari 2016

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). h.10.

kelembagaan²¹, sedangkan substansi hukum meliputi segala bentuk peraturan yang bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum dan hukum yang berlaku di masyarakat.²² Adapun budaya atau kultur hukum merupakan sifat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama.²³

1) Struktur Hukum

Struktur hukum Merupakan kerangka yang menopang, membangun dan menjamin dapat tegaknya sebuah bangunan hukum.²⁴ Sebagai sebuah dimensi struktural yang berperan membawa substansi hukum dari fikiran menuju kenyataan, tentunya lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang paling berperan. Terkhusus kepada penegakan peraturan daerah, maka yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana dalam pasal 255 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun terkait kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut Satpol PP) dimungkinkan untuk melakukan tindakan penertiban non-yudisial terhadap pelanggaran Perda dan atau Perkada.²⁵

²¹Friedman, *American Law: as an Introduction*, dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, h.11.

²²Friedman, *American Law: as an Introduction*, dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, h. 12.

²³Friedman, *American Law: as an Introduction*, dalam Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, h.12.

²⁴Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, h. 14-15

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 255.

Tindakan ini berlaku menyeluruh kepada warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum. Selain itu dimungkinkan pula bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.

Terkait fungsi koordinasi dan kerjasama, Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian. Sebagaimana dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.²⁶

Hadirnya Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memberikan sebuah bentuk penjaminan terhadap tegaknya Peraturan Daerah itu sendiri.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi segala bentuk aturan yang bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum. Dalam konteks Perda zakat di Kabupaten Takalar, peraturan yang dimaksudkan tentunya bersumber dari syariat Islam. Substansi hukum yang dibahas dalam tulisan ini tentunya meliputi perda yang lahir dan hidup di Kabupaten Takalar, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Sehingga akan dielaborasi melalui perspektif yuridis, aturan-aturan yang

²⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Bab X Pasal 28.

bersumber dari syariat Islam yang selanjutnya bertransformasi menjadi kaidah hukum positif yang terakomodir dalam peraturan daerah tersebut. Adapun perda tersebut jika ditelaah akan mengarah pada tiga norma syariat Islam yaitu: kewajiban mensucikan harta, dan larangan bersifat kikir.

Norma dalam syariat Islam ini bertransformasi menjadi kaidah hukum positif dalam wujud Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan zakat.

Kekayaan atau harta pada dasarnya milik Allah, tetapi diberikan kepada manusia sebagai hadiah atau cobaan dari Allah.²⁷ Sementara itu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mensucikan hartanya dengan berzakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS at Taubah/ 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, engkau membersihkan dan mensucikan mereka.²⁸

Elaborasi selanjutnya yaitu zakat memberikan indikasi larangan bersifat kikir. Salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah adalah dengan menafkahkan harta di jalan Allah. Islam membenci sifat kikir, dengan indikasi bahwa sifat kikir dapat menimbulkan kebencian dan kedengkian²⁹ orang-orang fakir terhadap orang kaya

²⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk., h. 126.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 203.

²⁹Didin Hafiuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 10.

yang tidak mau berbagi. Al Qur'an secara tegas memberikan sanksi kepada mereka yang bersifat kikir, yaitu terdapat dalam QS an-Nisa/ 4: 37

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.

Berdasarkan perda zakat ini, yang menjadi pertanyaan kemudian apakah pembentukan perda zakat ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkhusus pada Pasal 5 (lima), yaitu aturan asas-asas yang harus terimplementasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.³⁰

Asas-asas tersebut kemudian menjadi tolak ukur baik buruknya proses transformasi norma agama yang kemudian dijadikan sebagai kaidah hukum nasional. Seperti halnya dalam asas yang pertama yaitu asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan terkait Perda No. 05 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar adalah apakah perda zakat Ini mempunyai tujuan yang jelas dan

³⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan*, Bab II, Pasal 5.

dan hendak dicapai.³¹ Secara eksplisit, asas kejelasan tujuan ini terdapat pada BAB II Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang menjelaskan bahwa perda zakat ini bertujuan untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³²

Asas selanjutnya yang harus terpenuhi adalah asas kelembagaan, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan apabila peraturan tersebut dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang maka dapat dibatalkan demi hukum.³³ Keberadaan perda zakat ini tidak lain karena adanya peraturan yang di rumuskan pemerintah bersama DPRD Kab. Takalar. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah yaitu perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.³⁴

Asas yang kemudian menjadi titik dasar pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kesesuaian. Artinya, harus ada kesesuaian jenis herarki dengan memperhatikan secara benar materi muatannya. Perda zakat di Kabupaten Takalar ini merupakan hasil dari adanya UU RI Nomor 38 Tahun 1999 dengan amandemen UU RI No. 23 Tahun 2011. Dengan kata lain pembentukan perda zakat ini karena adanya

³¹Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, (Makassar: CV Indo media, 2013), h. 39.

³²Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang teknis pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar*, Bab II Pasal 1,2 dan 3.

³³Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, h. 39.

³⁴Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 131.

aturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sehingga menjadi acuan dalam pembentukan perda ini.

Setelah asas kesesuaian, yang harus diperhatikan agar pengimplementasian atau penerapan suatu peraturan perundang-undangan adalah asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan terlebih dahulu efektivitasnya di dalam masyarakat.³⁵ Sebelum menciptakan perda zakat ini, pemerintah Kabupaten Takalar tentunya memperhatikan kondisi masyarakatnya. Kondisi masyarakat Kabupaten Takalar pada saat ini adalah 98,94% penduduknya menganut agama Islam.³⁶ Dengan persentase yang sangat besar itu, kemudian pemerintah berinisiatif untuk menciptakan perda zakat ini, karena mengeluarkan zakat adalah perintah agama yang harus dijalankan oleh semua umat Islam, maka pemerintah mentransformasikannya kedalam suatu peraturan daerah. Kemudian besar kemungkinan efektivitas pelaksanaan perda ini berjalan dengan maksimal.

Asas selanjutnya yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁷ Terkait dengan pembentukan Perda No. 05 Tahun 2003 ini yang menjadi dasar pembentukannya sesuai dengan asas pendayagunaan dan kehasilgunaan adalah yang terdapat pada Bab

³⁵Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, h. 39.

³⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013*, h. 1.

³⁷Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, h. 40.

II Pasal 3 Huruf b yaitu meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.³⁸ Terlihat jelas bahwa tujuan dibentuknya perda ini adalah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar dan juga untuk menciptakan keadilan sosial.

Asas berikutnya adalah asas kejelasan rumusan dan juga asas keterbukaan. Asas kejelasan rumusan yaitu asas yang mengatur tentang teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, apakah sudah sesuai dengan aturan sebelumnya. Selanjutnya asas keterbukaan, yaitu segala proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus berifat transparan.³⁹

Demikianlah asas-asas yang harus terpenuhi dalam pembentukan dan pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan. Dari uraian uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya implementasi perda zakat sesuai dengan konsep yuridis , karena segala pembahasan tentang perda zakat sesuai dengan aturan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda zakatnya berkiblat dengan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dari proses transformasi norma dalam hukum Islam menjadi kaidah hukum positif tersebut dapatlah dicermati bagaimana syariat Islam di akomodir dalam wadah hukum nasional melalui media peraturan daerah.

³⁸Pemerintah Kabupaten takalar, *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang teknis pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar*, Bab II Pasal 3.

³⁹Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, h. 40.

3) Budaya hukum

Hasil penelitian, ditemukan yaitu budaya hukum yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Takalar adalah gotong royong dan saling membantu. Ketika ada salah satu warga masyarakat di Kabupaten Takalar yang membutuhkan bantuan, maka dengan kesadaran tersendiri dan telah tertanam di dalam dirinya bahwa hukumnya wajib untuk memberikan bantuan.

b) Perspektif Politis

Sahlan Gasri, S.H mengemukakan alasan politis lahirnya Perda Zakat di Kabupaten Takalar yang dalam hal ini tertuang dalam Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat yaitu penduduk yang ada di Kabupaten Takalar merupakan mayoritas muslim yang taat sehingga memudahkan untuk dilakukan pengumpulan zakat. Dengan mayoritas masyarakat muslim, maka perlu adanya pemerintah menciptakan produk hukum sebagai bentuk aspirasi kepada masyarakatnya.⁴⁰ Selain dengan adanya alasan tersebut tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Diantaranya yaitu melanjutkan undang-undang yang ada, dan melaksanakan amanah dari undang-undang tersebut.⁴¹

Dengan adanya alasan-alasan tersebut tentunya menjadikan masyarakat semakin memahami dan ikut melaksanakan perda zakat ini. Selain karena mayoritas muslim, tapi yang membuat pemerintah membuat Perda No. 05 tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Zakat adalah adanya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang

⁴⁰Sahlan Gasri (55 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, *Wawancara*, Takalar, 3 Februari 2016.

⁴¹Sahlan Gasri (55 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, *Wawancara*, Takalar, 3 Februari 2016.

Pengelolaan Zakat. Mengacu terhadap UU RI No. 38 Tahun 1999 tentunya membuat Perda No. 05 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan hukum. Karena, pembuatan Perda ini berpatokan pada hukum yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 4 yaitu peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴²

c) **Perspektif Konstitusional**

Titik perbincangan selama pembahasan ini adalah apakah kehadiran Perda No. 05 Tahun 2003 tentang Teknik Pengelolaan Zakat tidak bertentangan dengan konstitusi ? Bukankah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya urusan agama merupakan kewenangan pemerintahan pusat?

Dari hasil elaborasi yang telah dilakukan, tidak ditemukan pelanggaran konstitusional dari pembentukan perda zakat ini. Beberapa alasannya yaitu landasan pengelolaan zakat secara implisit tertuang pada UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen menjadi UU RI No. 23 Tahun 2011 dengan segala kelengkapannya. Secara langsung, perda zakat yang berada di Kabupaten Takalar dalam hal ini Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat berkiblat kepada Undang-undang tahun 1999 tersebut, perda zakat di Kabupaten Takalar dalam kajian konstitusi tertuang dalam UUD 1945 pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa serta negara memberikan jaminan

⁴²Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*, h. 34.

kepada hak-hak warga negaranya atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.⁴³

Selanjutnya Kansil menyebutkan bahwa salah satu norma hukum adalah norma agama. Norma agama juga merupakan peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan.⁴⁴ Selain karena dibuat oleh pemegang kekuasaan, kehadiran perda zakat ini menjamin hak keadilan bagi masyarakat, dan apabila didayagunakan dengan benar dan tepat maka akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Terjawablah sudah keberadaan perda zakat sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi.

C. Kontinuitas Implementasi

Berdasarkan dari hasil Observasi, Peraturan Daerah No 05 Tahun 2003 tentang Teknis pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar telah terimplementasi dengan beberapa kekurangan, peluang dan tantangan diantaranya yaitu:

1. Kekurangan Perda Kab. Takalar No.05 Tahun 2003

Adapun beberapa kekurangan yang terdapat dalam pengimplementasian perda zakat di Kabupaten Takalar antara lain yaitu: ada beberapa masyarakat yang enggan mengeluarkan zakatnya, terutama di bagian zakat harta dari zakat profesi. Selain itu, perda tersebut tidak memiliki sanksi bagi orang tidak mau mengeluarkan zakat, sementara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh hukum adalah bersifat memaksa dalam arti, perda zakat ini dibuat hanya mengandalkan kesadaran masyarakat Takalar, sanksi yang terdapat dalam perda zakat di Kabupaten Takalar adalah sanksi

⁴³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 29, Ayat 1 dan 2.

⁴⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, h. 52.

yang ditujukan kepada amil zakat yang melakukan pelanggaran pidana seperti menggelapkan dana zakat yang telah terkumpul.

Tanggapan masyarakat yang telah di interview yaitu keberadaan perda zakat ini sangat membantu masyarakat miskin yang berada di Kabupaten Takalar.⁴⁵ Sementara masyarakat dari profesi yang berbeda mengatakan bahwa keberadaan perda zakat ini sangat membantu, alasannya pegawai sudah tidak perlu mengeluarkan secara manual zakat dari pendapatannya, tetapi sudah dilakukan pemotongan gaji dalam hal ini adalah zakatnya.⁴⁶ Dengan adanya perda tersebut maka membayar zakat bukan cuma kewajiban yang bersifat religius akan tetapi juga mengikat secara yuridis. Sehingga semua kalangan masyarakat yang termasuk dalam wajib zakat mau mengeluarkan zakatnya.

2. Peluang Efektifitas Implementasi

Peluang terkait efektifitas pelaksanaan perda zakat di Kabupaten Takalar sangat besar, selain karena mayoritas masyarakatnya muslim tentunya juga didorong oleh ketaatan masyarakat muslim tersebut, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya dana yang terkumpul dari tahun ketahun sebagai mana yang telah dijelaskan tadi.

3. Kendala yang dihadapi

Setiap pengimplementasian sesuatu akan memicu hadirnya beberapa kendala, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengimplementasikan Perda No. 05 Tahun

⁴⁵Husain Dg Janji, Petani, *Wawancara*, Takalar 12 Februari 2016

⁴⁶Duniati Dg Kanang, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Takalar 12 Februari 2016

2003 secara internal yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.⁴⁷ Sosialisasi itu sendiri hanya dilakukan sekali setahun, padahal idealnya sosialisasi seharusnya dilakukan secara rutin dan terus menerus. Selain untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perda zakat tersebut, juga menumbuhkan minat masyarakat untuk ikut melaksanakan perda tersebut. Sosialisasi terhadap produk hukum merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya.⁴⁸

Secara eksternal, kendala yang lahir dari kurangnya sosialisasi adalah, banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, Tetapi pemerintah tidak bisa disalahkan begitu saja, karena pemerintah telah melakukan sosialisasi dan seharusnya masyarakat sadar dengan sendirinya bahwa membayar zakat adalah kewajiban umat Islam dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.



⁴⁷Sahlan Gasri (55 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, *Wawancara*, Takalar, 3 Februari 2016.

⁴⁸Sahlan Gasri (55 Tahun), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, *Wawancara*, Takalar, 3 Februari 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar dalam perspektif yuridis, politis dan konstitusional maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Perspektif yuridis

- a. Dilihat dari substansi hukum, Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar berdasarkan dengan adanya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah produk hukum yang merupakan transformasi dari hukum Islam menjadi Hukum Nasional.
- b. Ditinjau dari sistem hukum, Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan zakat secara tegas ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Budaya masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pengimplementasian Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan zakat

2. Perspektif Politis

Landasan politis lahirnya Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Takalar

3. Perspektif Konstitusional

Dari hasil elaborasi, tidak ditemukan kaidah bahwa Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar melanggar konstitusi, seluruh kaidah yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi yang mencakup dua hal yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan kontribusi bagi perkembangan teori-teori hukum tata negara di Indonesia. Secara Praktis yaitu diharapkan penelitian ini memberikan penguatan terhadap Peraturan Daerah yang ditemukan selama penelitian.

1. Secara teoritis

Menghadirkan perspektif baru tentang pembuatan produk hukum yang bernuansa Islam. Selama ini para pakar tata negara hanya melakukan pendekatan kepada hukum positif saja, tanpa melirik norma Islami. Walaupun norma syariat tidak termasuk dalam Hukum Nasional, tapi tidak bisa dipungkiri peraturan daerah yang bersifat religius itu benar dan terbukti adanya.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Takalar terkait pelaksanaan Perda No. 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Takalar agar Perda zakat ini diketahui secara universal bukan secara parsial. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abu, Bakar Jabir Al Jazairi, *Minjahul Muslim*. Baerut: Darul Fikr, 1997.
- Asshiddiqey, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, *Kabupaten Takalar dalam Angka 2013*. Takalar: BPS Kabupaten Takalar, 2012.
- Hafiuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Kencana Pranamadia Group, 2015.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntutan Ibadat Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 2000.
- Jimung, Martin. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Dikutip dalam Hendra Karianga.
- Jumadi, *Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan)*. Makassar: CV Indo media, 2013.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tafsiriyah*. Bandung: Syaamil, 2013.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Ekonomi Zakat DI Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kiddler, Louise "Research Methods in Social Relation". Dikutip dalam Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- M. Marwan dan Jimmi P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- M. Sewang, Ahmad dan Syamsudduha Saleh. *Hubungan Agama dan Negara (Studi Pemikiran Buya Hamka)*. Makassar: Alauddin Press, 2011.

- Parman, Ali *Pengelolaan Zakat*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Pemerintah Kabupaten Takalar, *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar*.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan Salman Harun dkk. Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa, 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Teknis Pengelolaan Zakat*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Takalar. *Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat di Kabupaten Takalar*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. *Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Saryono, Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuhamedika, 2010.
- Shuhufi, Muhammad. *Pembacaan Fiqih Sosial atas Fikih Ibadah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zulfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

6/15/11
Muhammad Rajir

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Sadli Sabir

NIM : 10300112019

Semester/Klpg : VII / I

Angkatan : 2012

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)
2. Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Takalar.
3. Penerapan Otonomi Desa dalam UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Desa Parang Baddo Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata, 3 November 2015

Mengetahui
Penasehat Akademik

(Dra. Nila Satrawati, M. Si)
NIP. 19710712 199703 2 002

Pemohon,

(Muh. Sadli Sabir)
NIM 10300112019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sl. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 587 Tahun 2015
T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2015

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang Pedoman Edukasi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
2. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
- Sebagai pembimbing mahasiswa :
- Nama : Muh. Sadli Sabir
- NIM : 10300112019
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
- Judul Skripsi : Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar
(Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)
- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2014;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 30 Desember 2015
Dekan,

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.
424836

Samata, 29 Desember 2015

Nomor : SI.2/PP.00.9/02 /2015
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Muh. Sadli Sabir

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA (Pembimbing I)
2. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 5 Januari 2016
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Lantai II
Judul Skripsi : Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Ketua Jurusan,
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

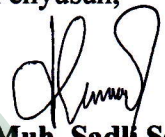
PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 65/HPK/2016


Judul Skripsi: Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)

Samata, 20 Januari 2016

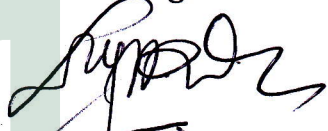
Penyusun,


Muh. Sadli Sabir
Nim. 10300112019

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
Nip.19570414 198603 1 003

Pembimbing II


Dr. Dudung Abdullah, M. Ag
Nip.19540203 198503 1 002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan HPK


Dra. Nila Sastrawaty., M.Si
Nip. 197107121997032002

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Nip. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu
Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
MAKASSAR 90222

Makassar, 29 Januari 2016

Kepada

Nomor : 01141 /P2T-BKPMD/19.36P/VII/01/2016

Lampiran : -

Yth. Bupati Takalar

Perihal : Izin Penelitian

di-

Takalar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/461/2016 tanggal 28 Januari 2015 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : Muh. Sadli Sabir
Nomor Pokok : 10300112019
Program Studi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Stt Alauddin No. 36 Samata-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR (ANALISIS YURIDIS, POLITIS DAN KONSTITUSIONAL)"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Januari s/d 29 Februari 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., M.S

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19610513 199002 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Peringgal



PEMPERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 01 Februari 2016

Nomor : 070/41/KKBP-II/ 2016
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth . Kabag Hukum dan Ham
KabTakalar
di
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala BKPM Pro. Sulawesi Selatan Nomor : 00916/P2T-BKPM/19.36P/VII/10/2015 tanggal 26 Januari 2016, Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

N a m a : **MUH.SADLI SABIR**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 09 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mah. Fak.Syariah & Hukum UIN Makassar
Alamat : Kalampa Kel.Kalabbirang Kec.Pattallassang Kab.Takalar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Kantor / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul

"IMPLEMENTASI PERDA ZAKAT DI KABUPATEN TAKALAR (ANALISIS YURIDIS,POLITIS DAN KONSTITUSIONAL)"

Yang akan dilaksanakan : 29 Januari s/d 29 Februari 2016
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar Foto Copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1.Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prop. Sulsel di Makassar ;
- 2.Bupati Takalar (sebagai laporan);
- 3.Para Anggota Forkopinda Kab. Takalar di Takalar;
- 4.Kepala Bappeda Kab. Takalar di Takalar;
- 5.DekanFak.Syariah&HukumUINAlauddin Makassar di Makassar;
- 6.Sdr (i) **MUH.SADLI SABIR** di Tempat;
- 7.Pertinggal.....

An.KERALA KANTOR
Kasubag Pata Usaha

M.NOOR TANG,SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19501231 198103 1 180

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 184 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
N a m a : Muh. Sadli Sabir
N I M : 10300112019
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2016
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : " Implementasi Perda Zakat Di Kab. Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.Hi
Penguji I : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag
Penguji II : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
Pelaksana : 1. Mujahida, SE
2. Drs. Baharuddin

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 29 Februari 2016
Dekan



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Implementasi Perda Zakat Di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konsstitusional)" yang disusun oleh saudara Muh. Sadli Sabir, NIM. 10300112019, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diujikan dan dipertahankan oleh sidang ujian seminar hasil diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Maret 2016 M. bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1437 H. dinyatakan telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

PEMBIMBING:

1. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
2. Dr. Dudung Abdullah. M. Ag

(.....)

(.....)

PENGUJI:

1. Dr. Achmad Musyahid, M. Ag
2. Dr. M. Thahir Maloko, MH
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA
4. Dr. Dudung Abdullah, M. Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Samata- Gowa, 16 Maret 2016

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MUH. SADLI SABIR, NIM: 10300112019**, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "*Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis, dan Konstitusional)*" Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian hasil.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 18 Februari 2016


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ali Parman, MA

NIP 19570414 198603 1 003



Dr. Dudung Abdullah, M. Ag

NIP 19540203 198503 1 002

KUESIONER

WAWANCARA

A. Pengantar

Berikut ini terdapat sejumlah pertanyaan yang jawaban atas pertanyaan tersebut akan digunakan sebagai bahan (data) dalam penelitian, mengenai : **Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)**. Oleh karena itu diharapkan kepada informan kiranya dalam menjawab pertanyaan dapat se-objektif mungkin.

B. Responden

Nama : H. Sahlan Gasri, S.H
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 5 April 1960
Jabatan : Kabag Hukum dan HAM
Nip : 196004051985031021

C. Pertanyaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa landasan politis (kebijakan) lahirnya Perda Zakat Di Kabupaten Takalar dalam hal ini yang diatur Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 ?	<ul style="list-style-type: none">- Potensi umat Islam yang ada ditakalar yang mayoritas. Memungkinkan untuk dilakukan Pertungutan zakat.- Melanjutkan undang - undang yang ada sebelumnya.- Melaksanakan arahan dari undang - undang.

2.	Siapa yang berperan penting dalam penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 ?	<ul style="list-style-type: none"> - Baz Kabupaten yang harus berperan penting untuk mengkordinir upz-upz di Kecamatan agar terkumpul dana zakat yang ada di desa - desa.
3.	Kenapa Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Harus ada ?	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi umat Islam ditengarai yang besar. - dan masyarakat itu untuk melaksanakan zakat. - Untuk melakukan / memberikan bantuan kepada Tk.TPA dan memberikan gaji untuk guru mengaji.

4.	<p>Seberapa efektif Implementasi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 Tentang Penyaluran Zakat ?</p>	<p>- Sudah efektif, seperti setiap tahunnya, semua Fakir Miskin mendapatkan bagian dari zakat yang diumpulkan</p>
5.	<p>Apakah telah ada contoh penegakan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 ?</p>	<p>- sudah ada contoh. karena tiap tahunnya zakat di kumpulkan oleh upz-upz kecamatan dan diserahkan ke Baz Kabupaten.</p> <p>- Baz Kabupaten menyalurkan zakat ke Fakir Miskin.</p>

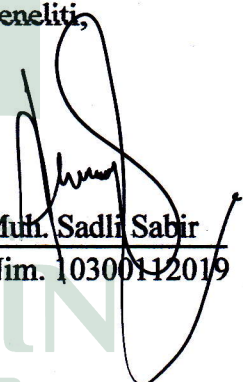
6.	<p>Apa kendala yang dihadapi pada saat menegakkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2003 ini ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat. - sudah diadakan sosialisasi tapi harus diadakan secara rutin. - sosialisasi hanya sekali setahun
----	--	--

Takalar, 03 Februari 2016

Responden,

Peneliti,


H. Sahlan Gasri, S.H
 Nip. 196004051985031021


Muh. Sadli Sabir
 Nim. 10300112019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri



Nama : Muh. Sadli Sabir
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 09 April 1994
Agama : Islam
Suku/Bangsa : Makassar, Indonesia
Ayah : Muh. Sabir, S. Sos
Ibu : Hj. Saeba K, S. Pd

Alamat : Kalampa', Kel. Kalabbirang, Kec.

Pattallassang, Kab. Takalar

Nomor Telepon : +6282 3 4992 9294

Alamat E-Mail : Muhsadlisabir@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK pada tahun 2000, di TK Pertiwi
2. Tamat SD pada tahun 2006, di SDN 234 Inpres Takalar Kota
3. Tamat SMP pada tahun 2009, di SMP Pesantren Tarbiyah Takalar
4. Tamat SMA pada tahun 2012, di SMA Pesantren Tarbiyah Takalar
5. Terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana S1 Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Tahun 2012, di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

C. Pengalaman Organisasi

1. Gerakan Pramuka
2. Organisasi Santri Intra Pesantren (OSIP) PMT Takalar
3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HmI)
4. Anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA)
5. Anggota Independent Law Student (ILS)
6. Anggota Purna Paskibraka Indonesia.
7. Pendidik di Sanggar Seni SETAPAL.

D. Prestasi

1. Juara III Lomba Mewarnai TK tingkat Kab. Takalar Tahun 2005
2. Juara I Musabaqah Fahmi Kutubut Turats (MUFAKAT) Tingkat Kab. Takalar Tahun 2011.
3. Delegasi Kabupaten Takalar Dalam Musabaqah Fahmi Kutubut Turats (MUFAKAT) Tingkat SulSelBar Tahun 2011.
4. Juara I Lomba Khutbah pada Pentas Pendidikan Anak Shaleh (PAI) Tingkat Kab. Takalar Tahun 2011.
5. Delegasi Kabupaten Takalar dalam Pentas Pendidikan Anak Shaleh Tingkat SulSelBar Tahun 2011.
6. Juara II Cerdas Cermat Al-Quran Tingkat Kab. Takalar Tahun 2011.

